

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, muncul ekspektasi bahwa pemerintah desa mampu berdiri lebih mandiri dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing, mengingat setiap desa memperoleh keleluasaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan keluaran sekaligus produk akhir dari rangkaian proses akuntansi. Dokumen ini digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai sumber informasi, sekaligus menjadi sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Realitas masih rendahnya mutu Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menuntut para pengelola keuangan untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat disajikan secara wajar, terhindar dari kesalahan penyajian yang material, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi oleh pembaca dan pengguna laporan keuangan (Wisang , 2023).

Menurut Permendagri No 59 Tahun (2007) Laporan keuangan merupakan hasil akhir yang dihasilkan dari penerapan ilmu akuntansi, sehingga penyusunannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan suatu sistem yang terstruktur. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang bermutu, diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah mencakup rangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data hingga tahap